

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

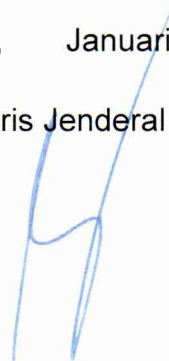
Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Biro Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Bayan
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

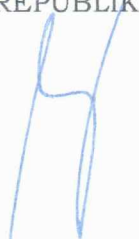
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

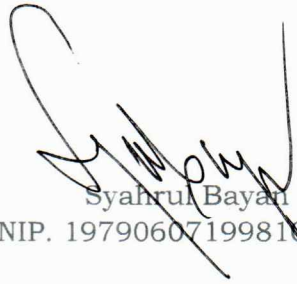
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK,


Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


Syahrul Bayan
NIP. 197906071998101002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Jumlah dokumen layanan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Dokumen
	Jumlah layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Layanan
	Jumlah arsip laporan masyarakat yang dikelola	20 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Output 1: Layanan Data dan Informasi	Rp 5.138.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Umum	Rp 5.528.000
Output 2: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 5.258.000
Output 3: Layanan Perkantoran	Rp 979.742.000
Total	Rp 995.666.000

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK,

Syahrul Bayan
NIP. 197906071998101002



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Jumlah dokumen layanan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Dokumen	Merupakan dokumen layanan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, terdiri atas data capaian penyelesaian laporan, capaian pencegahan maladministrasi, dan capaian manajemen mutu	Dokumen Layanan Data Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Berdasarkan jumlah dokumen layanan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
	Jumlah layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 Layanan	Merupakan layanan administrasi unit kerja Keasistenan (Pengaduan Masyarakat, Substansi I s.d VII, Resolusi dan Monitoring, Manajemen Pencegahan Maladministrasi, dan Manajemen Mutu) berupa dokumen administrasi, dokumen perencanaan, dan dokumen lainnya.	Data Layanan Administrasi Unit Kerja Keasistenan	Berdasarkan jumlah layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan selama 1 tahun

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Jumlah arsip laporan masyarakat yang dikelola	20 Dokumen	Merupakan layanan atas pengelolaan dokumen arsip laporan masyarakat	Data Pengelolaan Arsip Laporan Masyarakat	Berdasarkan jumlah pengelolaan arsip laporan masyarakat yang dikelola
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	Merupakan layanan operasional Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Data Layanan Pengelolaan Operasional Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan operasional yang diberikan selama 1 tahun